



LKIP

Sekretariat Daerah

2024



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2024 dapat disusun dan selesai tepat waktu.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Manggarai. Selain itu laporan ini memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa penyusunan LKIP ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKIP di tahun mendatang.

Akhir kata semoga LKIP ini menjadi bagian dari upaya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara terukur dan akuntabel.

Ruteng, 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH

SAHANG FANSI ALDUS



Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah bekerja di atas prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban sekurang-kurangnya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran. Di samping itu, dalam rangka evaluasi, harus disiapkan juga indikator-indikator sebagai barometer untuk menilai capaian sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026 serta dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Dalam dokumen RENSTRA, IKU dan Perjanjian Kinerja telah ditetapkan 3 sasaran dengan 17 indikator sasaran.

Untuk kemudahan membaca tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan capaian indikator sasaran, dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sebagai berikut:

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
$x > 100\%$	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.
$80\% < x \leq 100\%$	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
$60\% < x \leq 80\%$	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi/target.
$x \leq 60\%$	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator sasaran tahun 2024 yang juga merupakan capaian kinerja ke-3 periode perencanaan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Nilai Capaian Kinerja							
				Istimewa ($x > 100\%$)		Baik ($80\% < x \leq 100\%$)		Cukup ($60\% < x \leq 80\%$)		Kurang ($x \leq 60\%$)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1	Sasaran 1	4	100,54	1	25,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00
2	Sasaran 2	12	99,58	3	25,00	9	75,00	0	0,00	0	0,00
3	Sasaran 3	1	93,32	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
Jlh	3 Sasaran	17	97,81	4	23,53	13	76,47	0	0,00	0	0,00

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas, rata-rata capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran adalah 97,81% predikat kinerja BAIK. Ke-3 sasaran tersebut diukur dengan menggunakan 17 (tujuh belas) indikator. Dari 17 (tujuh belas) indikator, terdapat 4 (empat) indikator atau 23,53% dengan predikat kinerja **ISTIMEWA** dan 13 (tiga belas) indikator atau 76,46% dengan predikat kinerja **BAIK**.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024, maka dialokasikan anggaran yang tersebar di 3 (tiga) program dan beberapa kegiatan/sub kegiatan strategis sebesar Rp.5.641.381.759,00 dengan penyerapan Rp.4.708.047.483,00 atau 83,46%.

Ruteng, 3 Februari 2025



SEKRETARIS DAERAH,

JAHANG FANSI ALDUS

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia Aparatur	5
E. Sistematika Penulisan LKIP	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	9
A. Perencanaan Strategis 2021-2026.....	9
B. Indikator Kinerja Utama	12
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	19
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	21
3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya.....	24
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026.....	27
3.3 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024	30
3.4 Inoovasi Sekretariat Daerah	61
3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
3.5.1 Sumber Daya Manusia Aparatur	62
3.5.2 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024	64
3.5.3 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis	65
3.5.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran	66

BAB IV PENUTUP 68

LAMPIRAN:

1. RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
3. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen agar penyelenggaraan roda pemerintahan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi dan efektivitas. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Karenanya, Sekretariat Daerah (SETDA) sebagai unsur staf yang berfungsi membantu Bupati dalam merumuskan berbagai kebijakan, harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

LKIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Penyusunan LKIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi, tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Pencapaian kinerja yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang tepat, jelas dan terukur agar tercipta penyelenggaraan

pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari praktik KKN. LKIP Sekretariat Daerah tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2024. Dalam LKIP ini akan disampaikan capaian kinerja dari masing-masing sasaran yang diukur dengan menggunakan indikatornya masing-masing. Fokus pembenahan LKIP Sekretariat Daerah pada 4 (empat) komponen kinerja yakni perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja. LKIP Sekretariat Daerah tahun 2024 juga merupakan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai adalah **MEMBANTU BUPATI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PENGOORDINASIAN ADMINISTRATIF TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI SERTA PELAYANAN ADMINISTRATIF**. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah;
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Sekretaris Daerah dibantu oleh 3 (tiga) Asisten. Dan ketiga Asisten itu dibantu oleh 10 (Sepuluh) Kepala Bagian dan masing-masing Kepala Bagian dibantu oleh Kepala Sub Bagian dan atau Jabatan Fungsional. Struktur organisasinya dapat dilihat pada uraian berikutnya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Struktur Organisasinya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai. Susunan organisasinya sebagai berikut:

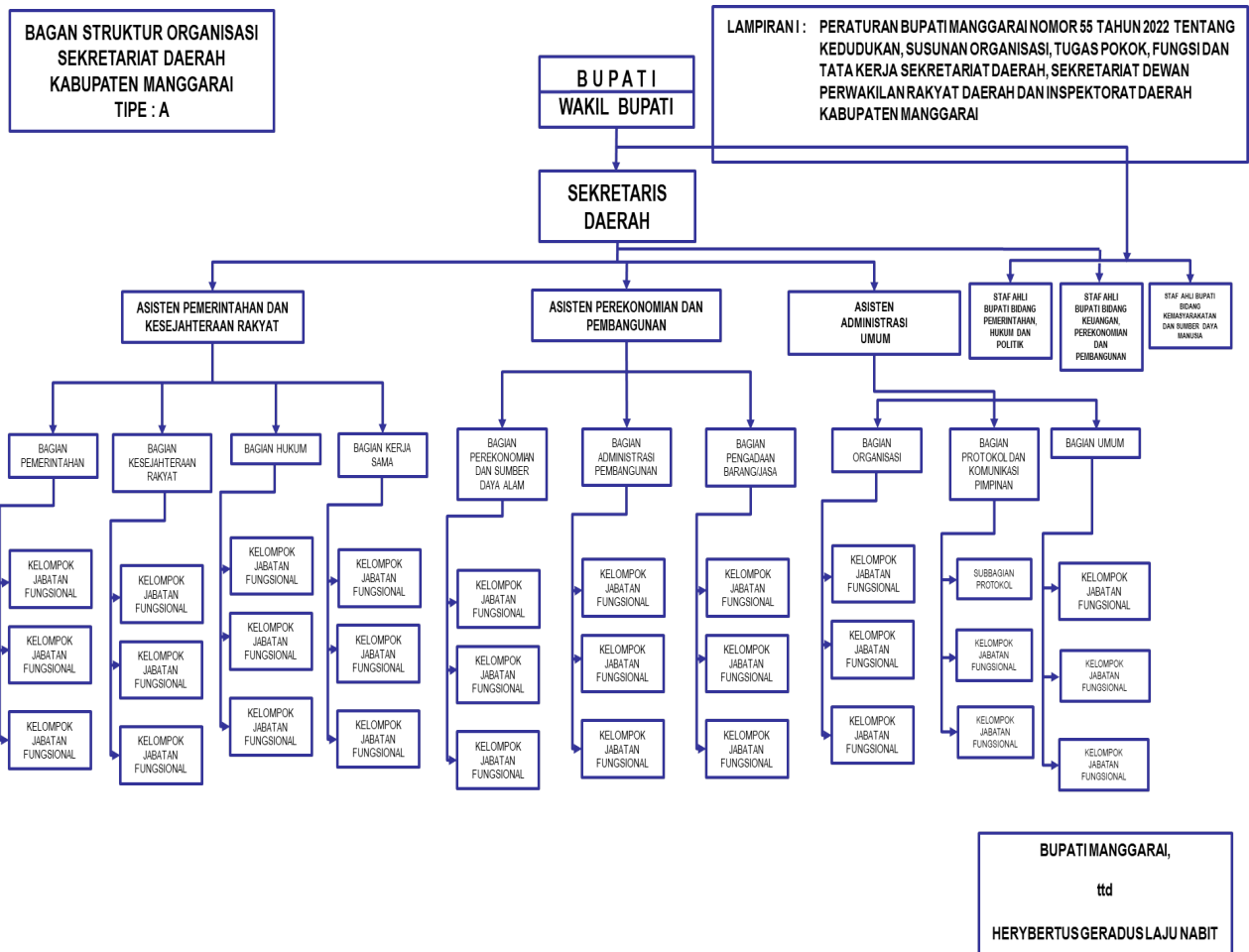
- Sekretaris Daerah
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 4 Bagian yaitu:
 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a. Substansi Administrasi Pemerinrahan;
 - b. Substansi Administrasi Kewilayahan; dan
 - c. Substansi Otonomi Daerah.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - a. Substansi Bina Mental Spiritual;
 - b. Substansi Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Substansi Kesejahteraan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a. Substansi Perundang-Undangan;
 - b. Substansi Bantuan Hukum; dan
 - c. Substansi Dokumentasi dan Informasi.
 4. Bagian Kerja Sama, terdiri atas :
 - a. Substansi Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri;
 - b. Substansi Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri; dan
 - c. Substansi Evaluasi Kerja Sama.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - a. Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b. Substansi Perekonomian; dan
 - c. Substansi Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a. Substansi Penyusunan Program;

- b. Substansi Pengendalian Program; dan
- c. Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :
 - a. Substansi Pengelolaan Barang/Jasa;
 - b. Substansi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c. Substansi Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- Asisten Administrasi Umum membawahi 3 Bagian yaitu:
 1. Bagian Umum, terdiri atas:
 - a. Substansi Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b. Substansi Keuangan; dan
 - c. Substansi Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 2. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a. Substansi Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b. Substansi Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c. Substansi Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a. Subbagian Protokol;
 - b. Substansi Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Substansi Dokumentasi Pimpinan.

Selain jabatan struktural tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) jabatan struktural lain yang bersifat koordinasi yaitu:

1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Perekonomian dan Pembangunan;
3. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Struktur Organisasi Setda Kabupaten Manggarai



D. SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

Berdasarkan struktur di atas jumlah jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berjumlah 18 jabatan dengan rincian Jabatan Pimpinan Tinggi (eselon II) berjumlah 7 jabatan, Jabatan Administrator (eselon III) berjumlah 10 jabatan dan Jabatan Pengawas (eselon IV) berjumlah 1 jabatan. Sedangkan jumlah jabatan fungsional ahli muda hasil penyetaraan jabatan sebanyak 29 jabatan.

Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai berjumlah 172 orang, dengan rincian PNS sebanyak 83 Orang dan PPPK serta Tenaga Honorer berjumlah 89 orang dengan komposisi sesuai pangkat/golongan dan pendidikan sebagai berikut ini:

a. Data Pegawai Berdasarkan Golongan / Ruang Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Golongan																Tanaga Honorer dan PPK	Jml
		I/a	I/b	I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
1.	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2.	Staf Ahli Bupati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
a.	Bagian Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	1	1	-	1	-	-	-	8
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	3	8
c.	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-	-	-	2	7
d.	Bagian Kerja Sama	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	2	7
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
a.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	2	-	1	-	-	1	10
b.	Bagian Administrasi Pembangunan	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	8
c.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	-	-	2	10
5.	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
a.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	2	-	1	-	-	3	11
b.	Bagian Organisasi	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	8
c.	Bagian Umum	-	-	-	-	3	3	3	3	-	2	-	1	-	1	-	-	74	90
Total		0	0	0	1	4	6	11	9	10	5	8	14	3	7	4	1	89	172

b. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan												Jumlah	
		Pegawai Negeri Sipil						PPPK dan Tenaga Honorer							
		SD	SMP	SMA	D2-D3	S1	S2	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
1.	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Staf Ahli Bupati	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
a.	Bagian Pemerintahan	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8
b.	Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	-	3	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	7
c.	Bagian Hukum	-	-	1	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-	8
d.	Bagian Kerja Sama	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	7
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
a.	Bagian Perekonomian dan SDA	-	1	4	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	10
b.	Bagian Adm. Pembangunan	-	-	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	8
c.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	2	-	-	10
5.	Asisten Administrasi Umum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
a.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	3	1	4	-	-	-	1	-	2	-	-	11
b.	Bagian Organisasi	-	-	2	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	8
c.	Bagian Umum	-	3	11	-	2	-	2	5	45	1	21	-	-	90
Total		0	4	34	6	40	1	2	6	51	1	27	0	172	

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

Sesuai Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Sistematika Penyusunan LKIP ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Setda, komposisi sumber daya manusia aparatur dan sistematika penulisan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini akan dijelaskan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Tahun 2024 yang terdiri atas Rencana Strategis (RENSTRA) Setda Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini akan diuraikan analisis capaian kinerja tahun 2024. Capaian kinerja akan tergambar dengan melihat perbandingan antara realisasi dengan target, realisasi tahun 2024 dengan realisasi tahun sebelumnya apabila sasaran dan indikatornya masih sama dan realisasi tahun 2024.

Bab IV Penutup

Pada bagian penutup akan disajikan simpulan menyeluruh yang disertai dengan beberapa rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS 2021-2026

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode Tahun 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran. Dalam penyusunan Renstra tersebut, penetapan visi dan misi mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut:

1. **VISI :** MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING

2. **MISI :**

1. Meningkatkan Mutu Sumber Daya Manusia.
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat.
3. Meningkatkan Mutu Lingkungan Hidup.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Berdasarkan Misi tersebut di atas, Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai mengemban misi ke-4 yaitu ***Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.***

3. TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai/diubah. Perubahan kondisi itu dapat berupa penurunan dan juga peningkatan. Tujuan merupakan kinerja yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan kata lain tujuan mempertajam misi organisasi. Tujuan organisasi meletakkan kerangka prioritas pembangunan. Di atas prioritas itulah semua program dan kegiatan serta alokasi anggaran diarahkan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan. Dengan kata lain sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan seperti tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	Nilai SAKIP Kabupaten	61,60 (B)	63,10 (B)	64,50 (B)	66,00 (B)	67,50 (B)	68,00 (B)	68,00 (B)
	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B	39,02	48,78	58,54	68,29	73,17	85,37	85,37
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	100,00	100	100	100	100	100	100
	-	Peringkat EKPPD	NA	Tinggi (3,41)	Tinggi (3,81)	Sangat Tinggi (4,21)	Sangat Tinggi (4,47)	Sangat Tinggi (4,73)	Sangat Tinggi (4,73)
	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD							
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	99,89	99,91	99,94	99,96	99,98	100	100
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	93,00	100	100	100	100	100	100
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	49,00	60,00	70,00	80,00	90,00	90,00	90,00
		Persentasi jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	49,19	55,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Kondisi Awal 2021	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	35,89	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	96,00	97,00	98,00	99,00	100	100	100
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	79,59	80,00	81,50	82,50	83,50	84,50	84,50
	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	33,33	34,66	59,99	73,32	86,65	100	100

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan parameter untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Perumusan IKU berpedoman pada Peraturan Menteri Negara PAN RI Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: Organ.065/164/XII/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Nomor: Organ.065 /72/VIII/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Nomor: Organ.065/164/XII/2021 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026. Adapun Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	-	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	Nilai dan Predikat hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun -1 oleh Kementerian PANRB	Bagian Organisasi
	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B	Persen	$\frac{\text{Jlh. PD yang memiliki Nilai SAKIP minimal B}}{\text{Jlh. seluruh PD}} \times 100$	Bagian Organisasi
		Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	$\frac{\text{Jlh. PD dengan Indeks Kelembagaan Efektif (Skor 61-80)}}{\text{Jlh. seluruh PD}} \times 100$	Bagian Organisasi
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai standar	Persen	$\frac{\text{Jlh. Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi KDH/WKDH sesuai Standar}}{\text{Jlh. Seluruh Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi KDH/WKDH}} \times 100$	Bagian Prokomin
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	$\frac{\text{Jlh. pelayanan terhadap KDH/WKDH dan SEKDA yang sesuai standar}}{\text{Jlh. seluruh pelayanan terhadap KDH/WKDH dan Sekda}} \times 100$	Bagian Umum
		-	Peringkat EKPPD	Peringkat	Nilai dan Peringkat Hasil Evaluasi LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri
	Meningkatnya sistem	Nilai LPPD	Nilai	Diperoleh dari hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri	Bagian Pemerintahan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB
	pengendalian kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. kebijakan strategis bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang pemerintahan}} \times 100$	Bagian Pemerintahan
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. kebijakan strategis bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bdg. kesejahteraan rakyat}} \times 100$	Bagian Kesra
		Persentase penyaluran Bansos tepat sasaran	Persen	$\frac{\text{Jlh. Bansos yang disalurkan tepat sasaran}}{\text{Jlh. seluruh penyaluran bansos}} \times 100$	Bagian Kesra
		Persentase produk hukum daerah yang tidak dibatalkan	Persen	$\frac{\text{Jlh. produk hukum daerah yang tidak dibatalkan}}{\text{Jlh. seluruh produk hukum yang diusulkan}} \times 100$	Bagian Hukum
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	$\frac{\text{Jlh. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani}}{\text{Jlh. Perjanjian Kerja Sama yang diprakarsai}} \times 100$	Bagian Kerja Sama
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang perekonomian}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan SDA
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	$\frac{\text{Jlh. usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jlh. seluruh urusan bidang pembangunan}} \times 100$	Bagian Adm. Pembangunan

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	$\frac{\text{Jlh. pengadaan yang menggunakan e-Procurement}}{\text{Jlh. seluruh pengadaan}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Persentasi jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	$\frac{\text{Jlh. pengadaan yang dilakukan dgn metode kompetitif}}{\text{Jlh. Seluruh pengadaan}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	$\frac{\text{Jlh. Nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan}}{\text{Total belanja operasi dan modal}} \times 100$	Bagian Pengadaan Baran/Jasa
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	$\frac{\text{Jlh. persoalan pengelolaan SDA yang diselesaikan sesuai ketentuan}}{\text{Jlh. seluruh persoalan pengelolaan SDA}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan SDA
Meningkatnya pelayanan publik yang prima	-	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan di Pemkab Manggarai	Bagian Organisasi
	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	$\frac{\text{Jlh. Perangkat Daerah Pelayanan Publik yang memiliki nilai IKM minimal baik}}{\text{Jlh. seluruh Perangkat Daerah Pelayanan Publik}} \times 100$	Bagian Organisasi

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari bupati kepada pimpinan Setda untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) merupakan wujud nyata komitmen dari pimpinan Setda bahwa ada kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan apa yang telah diperjanjikan dengan apa yang akan dilakukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Artinya bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berikut anggarannya masing-masing serta seluruh sumber daya yang digunakan akan diarahkan pada capaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Perjanjian Kinerja tersebut juga mencakup kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud sebagai *impact* dari program dan kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dalam konteks ini terkandung makna bahwa program dan kegiatan memang terencana dan berkesinambungan (*by design and sustainable*). Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2024 yang disajikan dalam laporan ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan ABPD Tahun Anggaran 2024 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Sedangkan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tetap

mengikuti target yang terdapat dalam dokumen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 dimaksud, sebagai berikut:

Tabel 2.3

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	66,00 (B)
1.1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00
	-	Peringkat EKKPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,21)
1.2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET
1	2	3	4	5
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50
2.1	Meningkatnya sistem pengendali-an kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32

Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah

= 10 Inovasi

No	Program	Anggaran (Rp)	Ket.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	2.223.689.525,00	APBD-P
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.077.694.910,00	APBD-P
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	339.997.324,00	APBD-P
Jumlah Anggaran pada Program/Kegiatan Strategis		5.641.381.759,00	APBD-P
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Pendukung)		15.903.638.578,00	APBD-P
TOTAL ANGGARAN PERUBAHAN SETDA TA. 2024		21.545.020.337,00	APBD-P

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sebagai bentuk pelaporan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai menyusun LKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Manggarai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 maupun Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran yang merupakan hasil kinerja dari pelaksanaan program, kegiatan dan

sub kegiatan yang mendukungnya. Ukuran keberhasilan sasaran didasarkan pada Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dengan jelas.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan atas hasil pengukuran kinerja, maka Predikat Nilai Capaian Kinerja dikelompokan sebagai berikut :

NILAI CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT KINERJA	INTERPRETASI
x > 100%	ISTIMEWA	Tingkat capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi.

80% < x ≤ 100%	BAIK	Tingkat capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
60% < x ≤ 80%	CUKUP	Tingkat capaian kinerja sudah cukup namun masih di bawah ekspektasi / target.
x ≤ 60%	KURANG	Tingkat capaian kinerja masih kurang dan masih di bawah ekspektasi/target.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target kinerja atau faktor yang mendukung tercapai atau terlampauinya kinerja yang diharapkan.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja organisasi diperoleh capaian kinerja sasaran strategis yang kemudian dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut:

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
- Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen rencana strategis.
- Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (bila ada).
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

3.2.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	66,00 (B)	64,81 (B)	98,20
1.1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29	69,77	102,16
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
		Rata-rata Sasaran 1				
	Predikat Kinerja					ISTIMEWA
		Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi (4,21)	2,9317 (Sedang)	69,64
1.2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00	97,71	122,13
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	53,82	89,71
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,02	100,05
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00	100,00	101,01
		Rata-rata Sasaran 2				99,58
		Predikat Kinerja				BAIK
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	86,21	104,50
2.1	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32	68,42	93,32
		Rata-rata Sasaran 3				93,32
		Kategori				BAIK
RATA-RATA SASARAN 1 + 2 + 3						
						97,81
PREDIKAT KINERJA						
						BAIK

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut di atas terdapat capaian indikator tujuan yang melebihi target sebanyak 1 indikator atau 33,33% dan capaian indikator tujuan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator atau 66,67%.

Sementara hasil pengukuran kinerja terhadap indikator sasaran, terdapat 4 indikator atau 23,53% yang melebihi target, capaian indikator sasaran yang sesuai target sebanyak 10 indikator atau 58,82% dan capaian indikator sasaran yang tidak mencapai target sebanyak 3 indikator atau 17,65%, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Tujuan
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2024

No	Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Persentase
1	Melebihi/Melampaui Target	1	33,33
2	Sesuai Target	0	0,00
3	Tidak Mencapai Target	2	66,67
Jumlah		3	100,00

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2024

No	Nilai Capaian Kinerja	Jumlah Indikator	Persentase
1	Melebihi/Melampaui Target	4	23,53
2	Sesuai Target	10	58,82
3	Tidak Mencapai Target	3	17,65
Jumlah		17	100,00

3.2.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

Pada bagian ini disajikan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan kinerja tahun sebelumnya mengacu pada indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Tahun 2021-2026, IKU Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	64,50	64,38	99,81	66,00 (B)	64,81 (B)	98,20
Sasaran 1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	58,54	74,42	127,12	68,29	69,77	102,16
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan keprotokol dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Sasaran 1						106,78			100,54
Predikat Kinerja Sasaran 1				ISTIMEWA			ISTIMEWA		
-	-	Peringkat EKPPD	Peringkat	Tinggi (3,81)	Rendah (2,16)	56,69	4,21 (Sangat Tinggi)	2,9317 (Sedang)	69,64
Sasaran 2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.3151 (Sedang)	2,16 (Rendah)	65,16	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	70,00	98,05	140,08	80,00	97,71	122,13
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	45,35	75,59	60,00	53,82	89,71
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	40,00	53,07	132,67	45,00	45,02	100,05
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	98,00	100,00	102,04	99,00	100,00	101,01
Rata-rata Sasaran 2						101,29			99,58
Predikat Kinerja Sasaran 2						ISTIMEWA			BAIK
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	81,50	85,25	104,60	82,50	86,21	104,50
Sasaran 3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	59,99	57,89	96,51	73,32	68,42	93,32
Rata-rata Sasaran 3						96,51			93,32
Predikat Kinerja Sasaran 3						BAIK			BAIK

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2023			Tahun 2024		
				Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RATA-RATA SASARAN 1 + 2 + 3						101,53			97,81
PREDIKAT KINERJA SASARAN 1 + 2 + 3					ISTIMEWA		BAIK		

Tabel 3.4 tersebut di atas menginformasikan bahwa capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2024 mencapai **97,81%** dengan predikat kinerja **BAIK**. Capaian kinerja 97,81% tahun 2024 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang mencapai **101,53%** dengan predikat kinerja **ISTIMEWA**.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Untuk mengetahui perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir periode perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	66,00 (B)	64,81 (B)	98,20	68,00 (B)	95,31
Sasaran 1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29	69,77	102,16	85,37	81,72
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 1					100,54		95,43
	Predikat Kinerja Sasaran 1				ISTIMEWA		BAIK	
-	-	Peringkat EKPPD	Peringkat	4,21 (Sangat Tinggi)	2,9317 (Sedang)	69,64	4,73 (Sangat Tinggi)	61,98
Sasaran 2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00	4.0951 (Tinggi)	71,59
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No.	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Sat.	Tahun 2024		%	Target Akhir Renstra	%
				Target	Realisasi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	108,56
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00	97,71	122,13	90,00	89,71
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	53,82	89,71	60,00	90,04
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,02	100,05	50,00	100,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 2					99,58		93,99
	Kategori Sasaran 2					BAIK		BAIK
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	86,21	104,50	84,50	102,02
Sasaran 3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32	68,42	93,32	100,00	68,42
	Rata-rata Sasaran 3					93,32		68,42
	Predikat Kinerja Sasaran 3					BAIK		CUKUP
RATA-RATA SASARAN 1 + 2 + 3						97,81		85,95
PREDIKAT KINERJA SASARAN 1 + 2 + 3						BAIK		BAIK

Tabel 3.5 tersebut di atas menginformasikan bahwa realisasi indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 menunjukkan capaian kinerja sebesar **85,95%** dengan Predikat Kinerja **BAIK**.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

TUJUAN 1

MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL

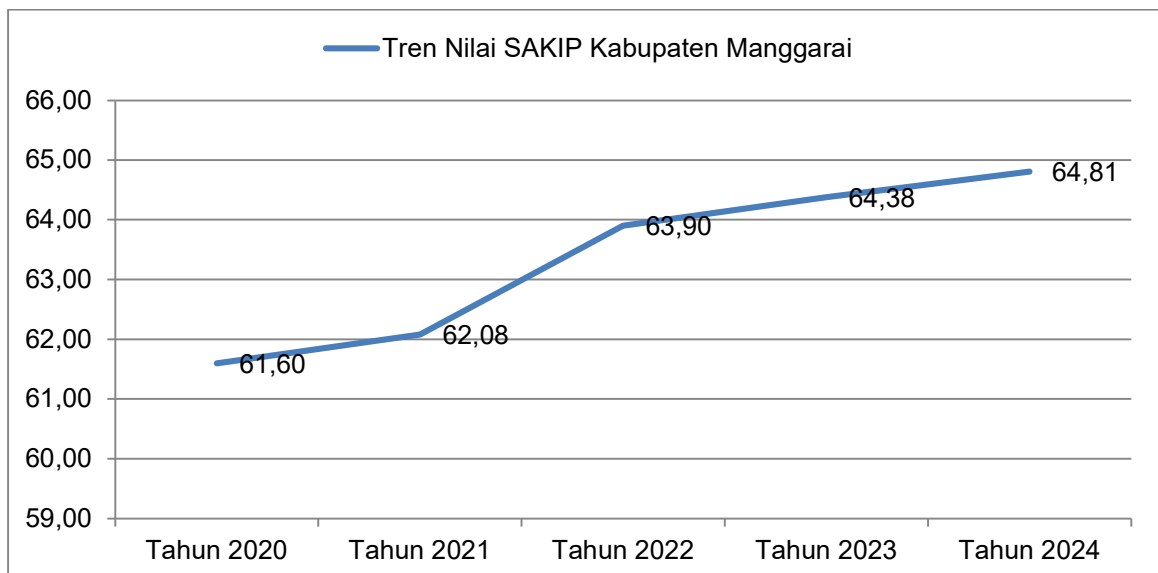
Indikator : Nilai SAKIP Kabupaten

Indikator : Peringkat EKPPD

Ketercapaian tujuan kinerja di atas direpresentasikan melalui 2 (dua) IKU dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2024 sebesar **90,10%** kategori capaian kinerja **BAIK**.

Indikator Tujuan Nilai SAKIP Kabupaten

Target 66,00 (B) → Realisasi 64,81 (B) → Capaian Kinerja 98,20% → Predikat **BAIK**



Sumber : LHE Kementerian PANRB

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2024 oleh Kementerian PANRB sesuai Surat Nomor B/358/AA.05/2024 tanggal 3 September 2024 Hal hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 menunjukkan nilai sebesar 64,81 dengan predikat "B". Rincian hasil evaluasi tersebut, sebagai berikut:

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	21,58	21,69
2	Pengukuran Kinerja	30	17,15	17,24
3	Pelaporan Kinerja	15	10,05	10,21

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,60	15,67
Nilai Hasil Evalasi		100	64,38	64,81
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2024

Tabel 3.6
Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2024

No	Instansi Pemerintah	Nilai	Predikat	Interpretasi
I	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	63,69	B	BAIK
1	Pemerintah Kabupaten Mangarai	64,81	B	BAIK
2	Pemerintah Kota Kupang	64,07	B	BAIK
3	Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat	62,29	B	BAIK
4	Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur	61,31	B	BAIK
5	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	60,96	B	BAIK
6	Pemerintah Kabupaten Sikka	60,79	B	BAIK
7	Pemerintah Kabupaten Nagekeo	60,65	B	BAIK
8	Pemerintah Kabupaten Belu	60,55	B	BAIK
9	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	60,49	B	BAIK
10	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara	60,30	B	BAIK
11	Pemerintah Kabupaten Ende	60,29	B	BAIK
12	Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah	60,14	B	BAIK
13	Pemerintah Kabupaten Alor	60,10	B	BAIK
14	Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	60,10	B	BAIK
15	Pemerintah Kabupaten Flores Timur	60,09	B	BAIK
16	Pemerintah Kabupaten Ngada	60,09	B	BAIK
17	Pemerintah Kabupaten Lembata	60,08	B	BAIK
18	Pemerintah Kabupaten Kupang	56,58	CC	CUKUP
19	Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua	55,27	CC	CUKUP
20	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat	52,22	CC	CUKUP
21	Pemerintah Kabupaten Malaka	51,44	CC	CUKUP
22	Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya	50,04	CC	CUKUP

Sumber : LHE Kementerian PANRB, 2024 dirangkum oleh Biro Organisasi Setda Prov. NTT

Sesuai tabel tersebut di atas, nilai AKIP Kabupaten Manggarai menempati Peringkat **ke-1** dari 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan nilai SAKIP Kabupaten Manggarai :

1. Tetap menjaga komitmen dalam implementasi SAKIP dan sinergitas birokrasi serta meminimalisasi ego sektoral dan bekerja secara tim.

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja melalui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
3. Melakukan pendampingan kepada seluruh Perangkat Daerah secara terus menerus, khususnya Kecamatan tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dengan demikian Perangkat Daerah Kecamatan memahami SAKIP dan manfaat dari implementasi SAKIP.
4. Menerapkan sistem manajemen kinerja yang andal serta berbasis teknologi informasi melalui aplikasi <https://sakup.manggarai.go.id>

Indikator Tujuan Peringkat EKPPD

Target 3,5751 (Tinggi) → Realisasi 2,9317 (Sedang) → Capaian Kinerja 82,00 % → Predikat **BAIK**

Realisasi indikator Peringkat EKPPD tahun 2024 diperoleh berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2023 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai tahun 2022.

Hasil evaluasi tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut, Kabupaten Manggarai memperoleh Skor **2,9317** Status Kinerja **SEDANG** dan menempati peringkat ke-174 dari 414 kabupaten seluruh Indonesia. Sementara pada tahun sebelumnya Kabupaten Manggarai memperoleh skor **2,16** status kinerja **RENDAH** dan menempati peringkat 291 dari 400 Kabupaten seluruh Indonesia.

Sedangkan skor dan status kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk 22 Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Manggarai tahun 2022, Kabupaten Manggarai menempati urutan **ke-1** seperti yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Skor dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Kabupaten/Kota Se-NTT
Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	
	SKOR KINERJA	STATUS KINERJA
Pemerintah Provinsi NTT	2,5793	RENDAH
1 Manggarai	2,9317	SEDANG
2 Kota Kupang	2,8572	SEDANG
3 Manggarai Barat	2,8497	SEDANG
4 Alor	2,8358	SEDANG
5 Ende	2,7103	SEDANG
6 Malaka	2,6386	SEDANG
7 Sumba Tengah	2,6214	SEDANG
8 Lembata	2,5943	RENDAH
9 Kupang	2,5515	RENDAH
10 Ngada	2,5481	RENDAH
11 Timor Tengah Selatan	2,5073	RENDAH
12 Timor Tengah Utara	2,4185	RENDAH
13 Nagekeo	2,3662	RENDAH
14 Rote Ndao	2,3200	RENDAH
15 Sumba barat	2,1672	RENDAH
16 Belu	2,1588	RENDAH
17 Sabu Raijua	2,1494	RENDAH
18 Sikka	2,1384	RENDAH
19 Flores Timur	2,1217	RENDAH
20 Manggarai Timur	1,5672	SANGAT RENDAH
21 Sumba Timur	1,4289	SANGAT RENDAH
22 Sumba Barat Daya	1,2028	SANGAT RENDAH

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023

Dalam pencapaian tujuan ***Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel***, didukung oleh 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu:

SASARAN 1 : MENINGKATNYA PENGENDALIAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	58,54	74,42	127,12	68,29	69,77	102,16
2	Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan terhdp KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata					106,78			100,54
Predikat Kinerja				ISTIMEWA			ISTIMEWA	

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas adalah 100,54%, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 106,78% dengan predikat kinerja yang sama yaitu **ISTIMEWA**. Penurunan ini antara lain disebabkan karena turunnya nilai AKIP pada 2 (dua) Perangkat Daerah (dari B ke CC dan C) dan angka target dari salah satu indikator meningkat dari tahun sebelumnya. Adapun uraian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Nilai SAKIP minimal B

Realisasi indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2024 adalah 69,77 dari target yang perjanjikan 68,29% dengan nilai capaian kinerja 102,16% predikat kinerja ISTIMEWA. Realisasi 69,77% diperoleh dari jumlah Perangkat Daerah/Unit Organisasi yang memiliki nilai SAKIP minimal B (Baik) sebanyak 30 Perangkat Daerah/Unit Organisasi dari total jumlah Perangkat Daerah/Unit Organisasi sebanyak 43 PD/Unit. Realisasi ini turun dari tahun 2023. Tahun 2023 jumlah PD/Unit Organisasi yang nilai AKIP-nya minimal B sebanyak 32 PD/Unit Organsasi.

Tabel 3.9
 Nilai dan Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
 Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai

No	Nama Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi		Tahun Evaluasi	Ket
		Nilai	Predikat		
1	2	3	4	5	6
1	Sekretariat Daerah	78,95	BB	2024	Evaluasi Terakhir
2	Sekretariat DPRD	71,10	BB	2024	Evaluasi Terakhir
3	Inspektorat Daerah	88,50	A	2024	Evaluasi Terakhir
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	74,10	BB	2024	Evaluasi Terakhir
5	Dinas Kesehatan	69,35	B	2024	Evaluasi Terakhir
6	Dinas PUPR	75,55	BB	2024	Evaluasi Terakhir
7	Dinas Perumahan Rakyat, KP dan Pertanahan	77,90	BB	2024	Evaluasi Terakhir
8	Satuan POLPP dan Pemadam Kebakaran	58,95	CC	2024	Evaluasi Terakhir
9	Dinas Sosial	77,85	BB	2024	Evaluasi Terakhir
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76,80	BB	2024	Evaluasi Terakhir
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,30	B	2024	Evaluasi Terakhir
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73,10	BB	2024	Evaluasi Terakhir
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	69,80	B	2024	Evaluasi Terakhir
14	Dinas Lingkungan Hidup	67,90	B	2024	Evaluasi Terakhir
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,50	BB	2024	Evaluasi Terakhir
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,70	BB	2024	Evaluasi Terakhir
17	Dinas Perhubungan	72,75	BB	2024	Evaluasi Terakhir
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	73,55	BB	2024	Evaluasi Terakhir
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73,10	BB	2024	Evaluasi Terakhir
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75,45	BB	2024	Evaluasi Terakhir
21	Dinas Perikanan	70,30	BB	2024	Evaluasi Terakhir
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69,85	B	2024	Evaluasi Terakhir
23	Dinas Peternakan	70,00	B	2024	Evaluasi Terakhir
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72,85	BB	2024	Evaluasi Terakhir
25	BAPPERIDA	74,75	BB	2024	Evaluasi Terakhir
26	BKPSDMD	82,05	A	2024	Evaluasi Terakhir
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	70,15	BB	2024	Evaluasi Terakhir
28	Badan Pendapatan Daerah	73,65	BB	2024	Evaluasi Terakhir
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	49,65	C	2024	Evaluasi Terakhir
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,75	B	2024	Evaluasi Terakhir
31	RSUD RUTENG	74,70	BB	2024	Evaluasi Terakhir
32	Kec. Langke Rembong	63,25	B	2022	Evaluasi Terakhir
33	Kec. Wae Ri'i	-	-	-	Belum Dievaluasi

No	Nama Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi		Tahun Evaluasi	Ket
		Nilai	Predikat		
1	2	3	4	5	6
34	Kec. Cibai	-	-	-	Belum Dievaluasi
35	Kec. Cibai Barat	-	-	-	Belum Dievaluasi
36	Kec. Reok	-	-	-	Belum Dievaluasi
37	Kec. Reok Barat	-	-	-	Belum Dievaluasi
38	Kec. Satar Mese	-	-	-	Belum Dievaluasi
39	Kec. Satar Mese Barat	-	-	-	Belum Dievaluasi
40	Kec. Satar Mese Utara	-	-	-	Belum Dievaluasi
41	Kec. Lelak	-	-	-	Belum Dievaluasi
43	Kec. Ruteng	-	-	-	Belum Dievaluasi
43	Kec. Rahong Utara	-	-	-	Belum Dievaluasi
JUMLAH SELURUH PERANGKAT DAERAH /UNIT ORGANISASI					43 PD/Unor
JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH DIEVALUASI					32
JUMLAH PERANGKAT DAERAH YANG BELUM DIEVALUASI					11
JUMLAH PERANGKAT DAERAH/UNIT ORGANISASI YANG MEMILIKI NILAI SAKIP MINIMAL B					30
PERSENTASE PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI NILAI SAKIP MINIMAL B					69,77%

Sumber : Inspektorat dan diolah oleh Bagian Organisasi Setda, 2024

Dari tabel tersebut di atas, terdapat 2 (dua) Perangkat Daerah yang nilai AKIP-nya mengalami penurunan hasil evaluasi tahun 2024, yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari Nilai/Predikat B tahun sebelumnya menjadi nilai/predikat CC tahun 2024.
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dari Nilai/Predikat B tahun sebelumnya menjadi nilai/predikat C tahun 2024.

Penurunan nilai dari kedua Perangkat Daerah tersebut antara lain disebabkan karena beberapa dokumen yang menjadi komponen evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tidak dilengkapi dan/atau tidak dibuat oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan sampai dengan saat dievaluasi.

Setiap tahun, Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai melakukan evaluasi terhadap Implementasi SAKIP Perangkat Daerah secara sampling.

Pada tahun 2024, Inspektorat Daerah telah melakukan evaluasi terhadap 31 Perangkat dengan rata-rata nilai hasil evaluasi tersebut adalah 72,35% kategori BB atau SANGAT BAIK.

Tabel 3.10
Perangkat Daerah Sampel Evaluasi SAKIP
Tahun 2022-2024

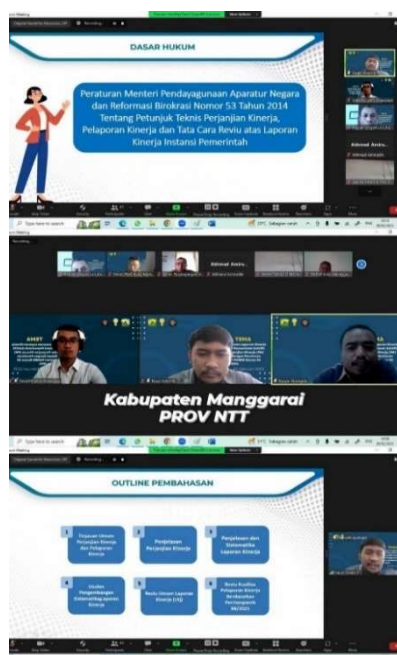
No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel	Kinerja		Kategori	
			%	Nilai		
1	2	3	4	5	6	
1	2022	1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	69,70	69,70	B
		2	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	68,45	68,45	B
		3	Dinas Lingkungan Hidup	69,70	69,70	B
		4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	67,85	67,85	B
		5	Dinas Sosial	67,85	67,85	B
		6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	66,30	66,30	B
		7	Dinas Perikanan	66,85	66,85	B
		8	Dinas Peternakan	66,85	66,85	B
		9	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	66,85	66,85	B
		10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	66,40	66,40	B
		11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67,60	67,60	B
		12	Dinas Perhubungan	67,85	67,85	B
		13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	66,85	66,85	B
		14	Dinas Komunikasi dan Informatika	72,25	72,25	BB
		15	Sekretariat DPRD	69,10	69,10	B
		16	Bappelitbangda	63,25	63,25	B
		17	BPBD	66,85	66,85	B
		18	BKPSDMD	66,35	66,35	B
		19	RSUD Ruteng	67,85	67,85	B
		20	Kec. Langke Rembong	63,25	63,25	B
Rata-rata Hasil Evaluasi Tahun 2022			67,40	67,40	B	
2	2023	1	Sekretariat Daerah	70,70	70,70	BB
		2	Inspektorat Daerah	60,75	60,75	B
		3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	74,25	74,25	BB
		4	Dinas Kesehatan	62,25	62,25	B
		5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75,25	75,25	BB
		6	Dinas Sosial	75,00	75,00	BB
		7	Dinas Perumahan, KP dan Pertanahan	71,45	71,45	BB
		8	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65,55	65,55	B
		9	Dinas Perikanan	67,70	67,70	B
		10	Dinas Peternakan	69,30	69,30	B
		11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67,85	67,85	B
		12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	78,55	78,55	BB
		13	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	65,85	65,85	B

No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel		Kinerja		Kategori
				%	Nilai	
1	2	3		4	5	6
		14	Dinas PMPTSP	67,90	67,90	B
		15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	71,90	71,90	BB
		16	Dinas Komunikasi dan Informatika	76,50	76,50	BB
		17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	70,85	70,85	BB
		18	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	65,75	65,75	B
		19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	63,60	63,60	B
		20	BAPPERIDA	74,08	74,08	BB
		21	Badan Keuangan dan Aset Daerah	69,80	69,80	B
		22	Badan Pendapatan Daerah	73,20	73,20	BB
		23	BKPSDMD	78,10	78,10	BB
Rata-Rata Evaluasi Tahun 2023				70,27	70,27	BB
3	2024	1	Sekretariat Daerah	78,95	BB	BB
		2	Sekretariat DPRD	71,10	BB	BB
		3	Inspektorat Daerah	88,50	A	A
		4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	74,10	BB	BB
		5	Dinas Kesehatan	69,35	B	B
		6	Dinas PUPR	75,55	BB	BB
		7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,90	BB	BB
		8	Satuan POLPP dan Pemadam Kebakaran	58,95	CC	CC
		9	Dinas Sosial	77,85	BB	BB
		10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76,80	BB	BB
		11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66,30	B	B
		12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	73,10	BB	BB
		13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	69,80	B	B
		14	Dinas Lingkungan Hidup	67,90	B	B
		15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	72,50	BB	BB
		16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	72,70	BB	BB
		17	Dinas Perhubungan	72,75	BB	BB
		18	Dinas Komunikasi dan Informatika	73,55	BB	BB
		19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73,10	BB	BB
		20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75,45	BB	BB
		21	Dinas Perikanan	70,30	BB	BB
		22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	69,85	B	B
		23	Dinas Peternakan	70,00	B	B
		24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	72,85	BB	BB
		25	BAPPERIDA	74,75	BB	BB
		26	BKPSDMD	82,05	A	A
		27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	70,15	BB	BB
		28	Badan Pendapatan Daerah	73,65	BB	BB
		29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	49,65	C	C

No.	Tahun Evaluasi	Nama Perangkat Daerah Sampel	Kinerja		Kategori
			%	Nilai	
1	2	3	4	5	6
		Daerah			
		30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah	68,75	B	B
		31 RSUD RUTENG	74,70	BB	BB
Rata-Rata Evaluasi Tahun 2024			72,35	72,35	BB

Sumber: Inspektorat Daerah dan Bagian Organisasi Setda, 2024

Rata-rata hasil evaluasi tahun 2024 terhadap penerapan SAKIP untuk 31 Perangkat Daerah tahun 2023 yang mencapai 72,35 kategori BB, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 70,27 kategori BB.



Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan nilai dan kategori SAKIP ini, pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Manggarai bekerjasama dengan *SmartID* Universitas Brawijaya Malang melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Perjanjian Kinerja (PK) Via *Zoom Meeting*. Kegiatan BIMTEK ini diikuti oleh Para Sekretaris, Kasubag. Perencanaan dan Keuangan/PEP/ Fungsional Perencana dari setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. Selain BIMTEK tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Organisasi Setda terus melakukan pendampingan/asistensi saat penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah.

Faktor Penghambat dalam pencapaian nilai SAKIP, antara lain:

1. Batas waktu penyusunan dokumen/laporan SAKIP yang singkat sementara dokumen yang disusun tidak hanya dokumen/laporan SAKIP namun juga laporan-laporan lainnya yang menyebabkan laporan dan data yang disajikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya.
2. Kurangnya komitmen dari Perangkat Daerah terkait penerapan dan penyusunan dokumen SAKIP Perangkat Daerah.
3. SDM Aparatur pada Sub Bagian Perencanaan/Fungsional Perencana sangat kurang.

2. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80).

Sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan evaluasi kelembagaan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri PANRB tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 melalui Bagian Organisasi Setda telah melaksanakan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai. Dari hasil evaluasi tersebut seluruh Perangkat Daerah berada di atas Peringkat Komposit 4 (P-4) atau berada pada Peringkat Komposit 5 (P-5) dengan skor 81-100. Peringkat komposit P-5 mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong **Sangat Efektif**. Struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal organisasi.

Dengan demikian, realisasi dari indikator sasaran ini masih menggunakan hasil evaluasi tahun 2023, dimana seluruh Perangkat Daerah yang dievaluasi berada di atas Peringkat Komposit 4 (P-4) atau berada pada Peringkat Komposit 5 (P-5) dengan skor 81-100.

Tabel 3.11
**Hasil Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah
 Kabupaten Manggarai
 Tahun 2023**

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PERINGKAT KOMPOSIT	KATEGORI
1	Sekretariat Daerah	94,375	Sangat Efektif
2	Sekretariat DPRD	94,375	Sangat Efektif
3	Inspektorat Daerah	94,375	Sangat Efektif
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	94,375	Sangat Efektif
5	Dinas Kesehatan	92,75	Sangat Efektif
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	94,375	Sangat Efektif
7	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	93,03	Sangat Efektif
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	83,996	Sangat Efektif
9	Dinas Sosial	93,106	Sangat Efektif

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PERINGKAT KOMPOSIT	KATEGORI
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,375	Sangat Efektif
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	94,375	Sangat Efektif
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	94,375	Sangat Efektif
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja	94,375	Sangat Efektif
14	Dinas Lingkungan Hidup	94,375	Sangat Efektif
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	94,375	Sangat Efektif
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	88,863	Sangat Efektif
17	Dinas Perhubungan	94,375	Sangat Efektif
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	83,601	Sangat Efektif
19	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	94,375	Sangat Efektif
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	94,375	Sangat Efektif
21	Dinas Perikanan	94,375	Sangat Efektif
22	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	94,375	Sangat Efektif
23	Dinas Peternakan	94,375	Sangat Efektif
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	94,375	Sangat Efektif
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	94,375	Sangat Efektif
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	83,996	Sangat Efektif
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	88,863	Sangat Efektif
28	Badan Pendapatan Daerah	94,375	Sangat Efektif
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	94,375	Sangat Efektif
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	94,375	Sangat Efektif
31	RSUD dr. Ben Mboi	94,375	Sangat Efektif
32	Kecamatan Langke Rembong	88,863	Sangat Efektif
33	Kecamatan Ruteng	88,863	Sangat Efektif
34	Kecamatan Wae Ri'i	88,863	Sangat Efektif
35	Kecamatan Cibal	88,863	Sangat Efektif
36	Kecamatan Reok	88,863	Sangat Efektif
37	Kecamatan Satar Mese	88,863	Sangat Efektif
38	Kecamatan Satar Mese Barat	88,863	Sangat Efektif
39	Kecamatan Lelak	88,863	Sangat Efektif
40	Kecamatan Rahong Utara	88,863	Sangat Efektif
41	Kecamatan Cibal Barat	88,863	Sangat Efektif
42	Kecamatan Reok Barat	88,863	Sangat Efektif
43	Kecamatan Satar Mese Utara	88,863	Sangat Efektif
Jumlah Total		3945,186	
Rata-rata		91,7485	

3. Indikator Persentase Pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sesuai Standar

Salah satu tugas dari Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan adalah melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati. Kegiatan yang difasilitasi terkait pelayanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan antara lain pada saat Bupati dan Wakil Bupati melakukan kunjungan kerja baik dalam wilayah Kabupaten Manggarai maupun di luar wilayah Kabupaten Manggarai; pada saat Bupati dan Wakil Bupati melakukan dialog dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Organisasi Masyarakat; pada saat penerimaan tamu pemerintah daerah dan kegiatan-kegiatan lainnya.

Kegiatan pelayanan kepada Bupati dan Wakil Bupati tersebut semuanya telah difasilitasi oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan telah memenuhi standar (SOP). Dengan demikian capaian dari indikator sasaran ini adalah 100% dari yang ditargetkan.

4. Indikator Persentase Pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang Sesuai Standar

Tugas pokok dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai adalah melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Pelayanan yang diberikan oleh Bagian Umum Setda kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah antara lain terkait Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tahun 2024 Bagian Umum Setda telah melaksanakan tugas pelayanan tersebut sesuai standar (SOP), dengan tingkat capaian kinerja 100%.

Tabel 3.12
**Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
 Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra**

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29	69,77	102,16	85,37	81,73
2	Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase pelayanan terhdp KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-rata					100,54		95,43
Predikat Kinerja					ISTIMEWA		BAIK

Realisasi tahun 2024 ini dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 maka rata-rata capaiannya adalah 95,43% Kategori kinerja **BAIK**.

Sasaran "**Meningkatnya Pengendalian Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja**" tersebut dicapai melalui program/Kegiatan sebagai berikut :

Bagian Organisasi, Bagian Prokompim dan Bagian Umum				
No	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		2.223.689.525,00	2.134.121.919,00	95,97
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.731.000,00	11.731.000,00	100,00
2	Kegiatan Penataan Organisasi	103.181.000,00	102.231.000,00	99,08
3	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	195.981.972,00	185.696.993,00	94,75
4	Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	750.360.553,00	702.056.469,00	93,56
5	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.162.435.000,00	1.132.406.457,00	97,42
Total Anggaran		2.223.689.525,00	2.134.121.919,00	95,97

SASARAN 2 : MENINGKATNYA SISTEM PENGENDALIAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Tabel 3.13
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai LPPD	Nilai	3,3151 (Sedang)	2,16 (Rendah)	65,16	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00
2	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	70,00	98,05	140,08	80,00	97,71	122,13
10	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	45,35	75,59	60,00	53,82	89,71
11	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	40,00	53,07	132,67	45,00	45,02	100,05
12	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	98,00	100,00	102,04	99,00	100,00	101,01
Rata-Rata					101,29			99,58
Kategori					ISTIMEWA			BAIK

Rata-rata capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas pada tahun 2024 adalah 99,58% kategori kinerja BAIK, mengalami penurunan jika dibandingkan

dengan tahun 2023 yang mencapai 101,29% dengan kategori kinerja ISTIMEWA. Adapun uraian masing-masing indikator sasaran sebagai berikut:

1. Indikator Nilai LPPD

Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran, yang dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyusun LPPD, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam LPPD. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi atau divalidasi oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, nilai LPPD Kabupaten Manggarai sesuai hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 adalah **2,9317** status kinerja **SEDANG**. Nilai dan status kinerja ini meningkat dari hasil penilaian tahun sebelumnya yaitu **2,16** Status Kinerja **RENDAH**.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja:

1. Batas waktu penyusunan laporan yang singkat sementara dokumen/laporan yang disusun tidak hanya LPPD namun juga laporan-laporan lainnya yang menyebabkan data yang diberikan terkadang belum mampu memenuhi kualitas yang seharusnya.
2. Adanya data IKK dan dokumen pendukung yang tidak sinkron dari Perangkat Daerah menyebabkan proses pencermatan dan koordinasi menjadi lebih lama.

Strategi dan/atau Solusi dalam mengatasi kendala dalam capaian kinerja:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui BIMTEK baik secara daring maupun luring.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan *stakeholder* terkait pengumpulan data dan penyusunan Laporan.

2. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Pemerintahan yang Ditindaklanjuti

Bagian Pemerintahan Setda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang **administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan** dan **otonomi Daerah**.

Pada tahun 2024, usulan kebijakan bidang pemerintahan terkait urusan administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah telah ditindaklanjuti oleh Bagian Pemerintahan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan capaian kinerja 100%. Capaian ini sama dengan tahun 2023 kategori BAIK.

3. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Ditindaklanjuti

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 Bagian Kesejahteraan Rakyat telah menindaklanjuti usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan bidang keagamaan terkait pemberian bantuan ke Gereja/Kapela, Masjid dan/atau kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, kebijakan bidang kesejahteraan sosial seperti bantuan ke rumah gendang dan kebijakan bidang kesejahteraan masyarakat seperti bantuan berobat bagi masyarakat kurang mampu, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka realisasi dari indikator sasaran ini pada tahun 2024 mencapai 100% dengan kategori BAIK sama dengan capaian pada tahun 2023.

4. Indikator Persentase Penyaluran Bansos Tepat Sasaran

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya **risiko sosial**.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Manggarai menyalurkan bantuan sosial (Bansos) sebanyak 52 bantuan dengan rincian bantuan sosial kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sebanyak 51 bantuan dengan total nilai bantuan sebesar Rp.1.202.500.000,00 dan bantuan sosial bersifat orang per orang sebanyak 9 bantuan dengan total nilai bantuan sebesar Rp.65.000.000,00. Ke-52 bantuan ini semuanya tepat sasaran atau mencapai 100% kategori MEMUASKAN.

Tabel 3.14
Data Bantuan Sosial
Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Bantuan (Rp)		Jumlah Bantuan (Rp.)
		Bantuan Perorangan	Kelompok Masyarakat	
1	2022	148.500.000,00	600.000.000,00	748.500.000,00
2	2023	42.000.000,00	825.000.000,00	867.000.000,00
3	2024	65.000.000,00	1.202.500.000,00	1.267.500.000,00
Total		255.500.000,00	2.627.500.000,00	2.883.000.000,00

Sumber : Bagian Kesra Setda, 2024

5. Indikator Persentase Produk Hukum Yang Tidak Dibatalkan

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah RANPERDA yang diusulkan oleh Eksekutif kepada Legislatif/DPRD. Pada tahun 2024, Pemerintah mengajukan 6 (enam) RANPERDA untuk dibahas bersama DPRD dan hasilnya ke-6 RANPERDA tersebut diterima dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

(PERDA) Kabupaten Manggarai. Berdasarkan uraian tersebut, maka realisasi dan capaian indikator sasaran ini adalah 100% kategori BAIK.

Tabel 3.15
RANPERDA yang ditetapkan menjadi PERDA
Kabupaten Manggarai
Tahun 2022-2024

No	RANPERDA	PERDA	KET
PENETAPAN TAHUN N 2022			
1	Tentang Pembentukan Badan Penang-gulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ditetapkan
2	Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Ditetapkan
3	Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2021	Ditetapkan
4	Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Ditetapkan
5	Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Ditetapkan
6	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2023	Ditetapkan
PENETAPAN TAHUN 2023			
1	Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	Ditetapkan
2	Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mnggarai	Ditetapkan
3	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2022	Ditetapkan
4	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan	Ditetapkan

No	RANPERDA	PERDA	KET
	Perubahan Kabupaten Manggarai TA. 2023	dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Manggarai TA. 2023	
5	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Manggarai TA. 2024	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Manggarai TA. 2024	Ditetapkan
6	Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai	Ditetapkan
PENETAPAN TAHUN 2024			
1	Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manggarai Tahun 2024-2043	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Manggarai Tahun 2024-2043	Ditetapkan
2	Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2023	Ditetapkan
3	Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Tahun 2025-2045	Ditetapkan
4	Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2024	Ditetapkan
5	Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045	Ditetapkan
6	Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2025	Ditetapkan

Sumber: Bagian Hukum Setda, 2024

6. Indikator Persentase Perjanjian Kerja Sama Yang Ditandatangani

Kerja Sama Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran ini mencapai 100%, dimana Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menandatangani perjanjian kerja sama

antara daerah dengan daerah lain dan antara daerah dengan pihak ketiga sebanyak 14 PKS/MoU. Sementara pada tahun 2023, realisasi indikator sasaran ini juga mencapai 100%, dimana Pemerintah Kabupaten Manggarai telah menandatangani perjanjian kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan antara daerah dan pihak ketiga sebanyak 15 PKS/MoU dari 15 PKS/MoU yang diprakarsai.

Tabel 3.16
Data Perjanjian Kerja Sama
Tahun 2022-2024

No	Tahun	Perjanjian Kerja Sama		Persentase
		Yang diprakarsai	Yang ditandatangani	
1	2022	16	16	100,00
2	2023	15	15	100,00
3	2024	14	14	100,00
Jumlah		45	45	100,00

Sumber : Bagian Kerja Sama Setda, 2024

7. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Perekonomian yang Ditindaklanjuti

Indikator ini diukur berdasarkan jumlah usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh usulan kebijakan bidang perekonomian dikali 100%. Pada tahun 2024, realisasi dan capaian indikator ini adalah 100% kategori kinerja BAIK. Kebijakan strategis bidang perekonomian yang dilaksanakan tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan terkait dengan pengendalian inflasi daerah.
2. Kebijakan terkait kegiatan operasi pasar murah sembako.
3. Survei stok ketersediaan barang kebutuhan pokok.
4. Monitoring harga barang dan jasa.

8. Indikator Persentase Usulan Kebijakan Bidang Pembangunan yang Ditindaklanjuti

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang **penyusunan program, pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan**.

Jumlah kebijakan strategis bidang pembangunan yang ditindaklanjuti pada tahun 2024, yaitu:

a. Bidang Pengendalian:

1. Instruksi Bupati Manggarai Nomor: HK/1/2024 tentang Akselerasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024. Instruksi ini mengatur seluruh tahapan pelaksanaan urusan Pembangunan pada APBD, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.
2. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/298/2024 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024.
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/297/2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai TA. 2025.

b. Bidang Evaluasi dan Pelaporan berupa surat-surat penegasan dan undangan rapat-rapat evaluasi pelaksanaan pembangunan, seperti surat penegasan tentang pelaksanaan proyek-proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Surat undangan rapat evaluasi penyerapan APBD secara keseluruhan yang dilaksanakan per tiga bulan. Surat-surat tersebut sudah mencakup 7 (tujuh) urusan bidang pembangunan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka realisasi dari indikator ini adalah 100% dari target 100% dengan kategori kinerja BAIK.

9. Indikator Persentase Pengadaan Barang dan Jasa melalui *e-Procurement*

E-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pengadaan barang dan jasa melalui *e-procurement* merupakan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya.

Pada tahun 2024, realisasi indikator sasaran ini adalah 97,71% dari target yang diperjanjikan sebesar 80,00% dengan capaian 122,13% predikat kinerja ISTIMEWA. Realisasi 91,71% ini diperoleh dari jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak **1.022 paket** dari jumlah seluruh pengadaan barang/jasa melalui **Penyedia** yang dilaksanakan sebanyak **1.046 paket**.

Pada tahun 2023, realisasi indikator sasaran ini adalah 98,05% dari target 70,00% dengan tingkat capaian 140,08% kategori kinerja ISTIMEWA. Realisais **98,05%** diperoleh dari jumlah seluruh paket pengadaan barang/jasa melalui *e-procurement* yang diumumkan melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebanyak **907 paket** dari jumlah seluruh pengadaan barang/jasa melalui **Penyedia** yang dilaksanakan sebanyak **925 paket**.

10. Indikator Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif

Persentase Jumlah Pengadaan yang dilakukan dengan Metode Kompetitif diperoleh dari Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif DIBAGI Jumlah Seluruh Pengadaan KALI 100%

Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif adalah jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif melalui *e-purchasing*, tender cepat dan tender.

Jumlah seluruh pengadaan adalah seluruh pengadaan baik metode kompetitif dan non kompetitif (swakelola) Pemerintah dari seluruh perangkat daerah yang ada sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pada tahun 2024, jumlah paket pengadaan dengan metode kompetitif sebanyak 563 Paket dengan rincian 91 paket pengadaan dilakukan dengan metode tender/seleksi dan 472 paket melalui *e-purchasing*. Sedangkan jumlah seluruh pengadaan sebanyak **1.046 paket**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka realisasi dari indikator sasaran ini adalah 53,82% dari target 60,00%, maka tingkat capaian kerjanya 89,71% kategori kinerja BAIK.

Tabel 3.17
Paket Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Paket Pengadaan Barang/Jasa melalui <i>e-Procurement</i>	Metode Kompetitif		Non Kompetitif (Pengadaan Langsung & Penunjukan Langsung)	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	PHK
			Tender	<i>e-purchasing</i>			
1	2022	583	215	-	368	8	-
2	2023	907	158	125	624	6	1
3	2024	1.046	91	472	483	9	-

Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Bagian Adm. Pembangunan, 2024

11. Indikator Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan

Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan diperoleh dari Jumlah Nilai Belanja Operasi dan Modal yang Melalui Pengadaan DIBAGI Total Belanja Operasi dan Modal KALI 100%.

Tahun 2024 jumlah belanja langsung melalui pengadaan sebesar Rp.482.008.449.821,00; sementara total nilai belanja langsung yang diperoleh dari Belanja Operasi (Non Belanja Pegawai) dan Belanja Modal sebesar Rp.1.070.616.561.453,00. Dengan demikian realisasi dari indikator **Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan** adalah 45,02% dari target 45,00% maka capaiannya 100,05 kategori kinerja **ISTIMEWA**.

Tabel 3.18
Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan
Tahun 2022-2024

No	Tahun	Belanja Langsung (Belanja Operasi (Non Belanja Pegawai) + Belanja Modal)	Belanja Langsung melalui Pengadaan	Rasio (%)	Ket.
1	2022	472.551.934.741,00	185.543.756.264,00	39,26	
2	2023	695.939.572.479,00	369.318.262.383,00	53,07	
3	2024	1.070.616.561.453,00	482.008.449.821,00	45,02	
Total		2.239.108.068.673,00	1.036.870.468.468,00	46,31	

Sumber : Bagian Pengadaan Barang/Jasa, 2024

12. Indikator Persentase Penyelesaian Persoalan Pengelolaan SDA sesuai Ketentuan

Realisasi indikator sasaran ini adalah 100% kategori kinerja MEMUASKAN, dimana pada tahun 2024 terdapat persoalan pengelolaan SDA. Persoalan tersebut dapat diselesaikan sesuai ketentuan yaitu:

1. Persoalan terkait pengembangan PLTP Ulumbu.
2. Persoalan terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak.
3. Persoalan terkait permintaan pemasangan jaringan listrik bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
4. Persoalan terkait masalah air minum bersih.

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Reali Sasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00	4.0951 (Tinggi)	71,59
2	Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	Persentase penyaluran bansos	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Reali Sasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
	tepat sasaran						
5	Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00	97,71	122,13	90,00	108,57
10	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	53,82	89,71	60,00	89,70
11	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,02	100,05	50,00	90,04
12	Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00
Rata-rata					99,58	96,66	
Kategori					BAIK	BAIK	

Berdasarkan tabel 3.14 tersebut di atas, realisasi indikator kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2021-2026 maka rata-rata capaiannya adalah 96,66% kategori kinerja **BAIK**.

Sasaran "**Meningkatnya Sistem Pengendalian Kebijakan Pemerintah Daerah**" tersebut dicapai melalui program dan anggaran sebagai berikut :

Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kerja Sama, Bagian Kesra, Bagian Adm. Pembangunan, Bagian PBJ dan Bagian Perekonomian dan SDA						
No	Nama Program		Anggaran	Realisasi	%	
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	dan	3.077.694.910,00	2.237.614.564,00	72,70	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan	dan	339.997.324,00	336.311.000,00	98,92	
Total Anggaran			3.417.692.234,00	2.573.925.564,00	75,31	

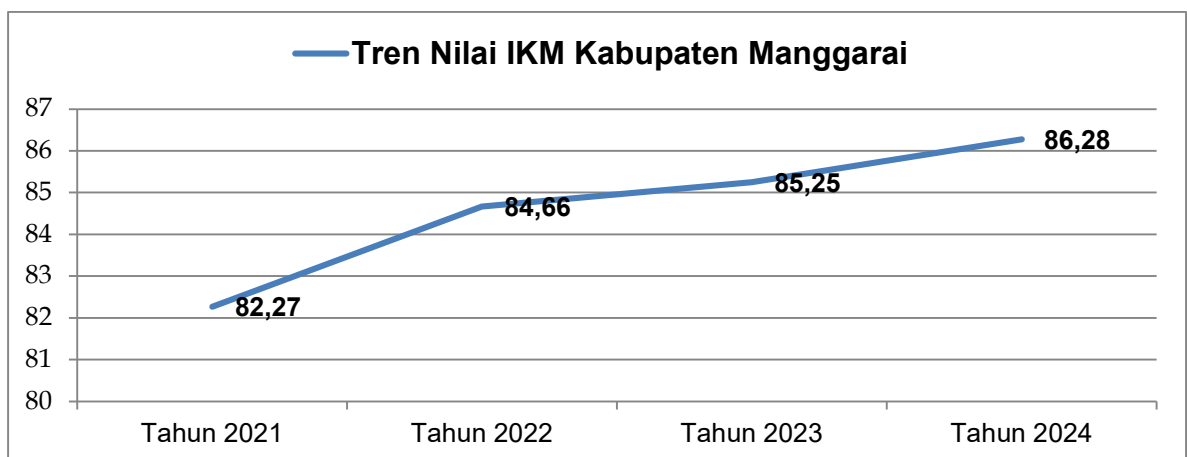
TUJUAN 2**MENINGKATNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA****Indikator Tujuan** Indeks Kepuasan Masyarakat**Target 82,50 (B) → Realisasi 86,28 → Capaian Kinerja 104,59% → ISTIMEWA**

Berdasarkan pengukuran rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah melebihi/melampaui target yang telah ditetapkan (82,50), realisasi 86,28 kategori B (Baik) dengan tingkat capaian 104,59% kategori kinerja ISTIMEWA.

Realisasi kinerja indikator tujuan *Nilai IKM* adalah penjumlahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (863,83) dibagi jumlah Perangkat Daerah yang melakukan survey (10 Perangkat Daerah termasuk RSUD Ruteng).

Keberhasilan capaian kinerja Indikator tujuan Nilai IKM, didukung dengan adanya koordinasi, dukungan dan komitmen bersama dari semua perangkat daerah, serta adanya pembinaan dan pengawasan yang konsisten dari Pemerintah Daerah melalui Bagian Organisasi Setda dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Capaian kinerja indikator tujuan Nilai IKM Perangkat Daerah harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kompetensi aparatur sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.



Dalam pencapaian tujuan **Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima**, didukung oleh Sasaran Strategis, yaitu:

SASARAN 3 : MENINGKATNYA SISTEM PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Tabel 3.20
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	59,99	57,89	96,51	73,32	68,42	93,32
Rata-Rata					96,51			93,32
Kategori Kinerja					BAIK			BAIK

Sasaran “*Meningkatnya Sistem Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik*” diukur menggunakan sebuah indikator yaitu :

1. Indikator Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal Kategori Baik

Nilai IKM diperoleh dari hasil SKM Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik. Pada tahun 2022-2024, terdapat 13 Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah melaksanakan SKM dari 19 Perangkat Daerah. Dari 13 Perangkat Daerah yang melakukan SKM tersebut semuanya memiliki Nilai IKM Baik atau 68,42%.

Realisasi 68,42% dari target 73,32% maka capaian kinerja dari indikator sasaran ini adalah 93,32% kategori kinerja BAIK. Realisasi kinerja 68,42% ini meningkat dari tahun 2023 yang mencapai 57,89%. Namun jika dilihat capaian kerjanya, maka capaian tahun 2024 (93,32%) mengalami penurunan dari tahun 2023 yang mencapai 96,51%. Hal ini dipengaruhi oleh angka target yang cukup tinggi di tahun 2024.

Tabel 3.21
**Nilai dan Kategori Hasil Pelaksanaan SKM Unit Pelayanan Publik
 Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai**

No	Nama Perangkat Daerah	HASIL PELAKS. SKM UPP			Tahun Pelaksanaan SKM	Ket.
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan		
1	Dinas PPO	91,74	A	Sangat Baik	Semester I (Januari-Juni) 2024	Lap. SKM Semester I 2024
2	Dinas Sosial	91,81	A	Sangat Baik	Semester I (Januari-Juni) 2024	Lap. SKM Semester I 2024
3	Dinas PMPTSP	94,41	A	Sangat Baik	Semester I (Januari-Juni) 2024	Lap. SKM Semester I 2024
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,86	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2024	Lap. SKM Semester I 2024
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	82,11	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2024	Lap. SKM Semester I 2024
6	RSUD Ruteng	86,30	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2024	Lap. SKM Semester I 2024
7	Kec. Langke Rembong	82,64	B	Baik	Tahun 2024 (Januari-Desember) 2024	Lap. SKM Tahun 2024
8	Kec. Lelak	83,11	B	Baik	Semester I (Januari-Juni) 2024	Lap. SKM Semester I 2024
9	Kec. Ruteng	83,57	B	Baik	Tahun 2024 (Januari-Des.) 2024	Lap. SKM 2024
10	Kec. Satar Mese	82,28	B	Baik	Tahun 2024 (Januari-Desember) 2024	Lap. SKM 2024
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	89,91	A	Sangat Baik	2023	Pelaks. SKM Terakhir
12	Kec. Satar Mese Barat	94,02	A	Sangat Baik	2022	Pelaks. SKM Terakhir
13	Kec. Reok	83,47	B	Baik	2022	Pelaks. SKM Terakhir
14	Kec. Reok Barat					Belum SKM
15	Kec. Cibal					Belum SKM
16	Kec. Cibal Barat					Belum

No	Nama Perangkat Daerah	HASIL PELAKS. SKM UPP			Tahun Pelaksanaan SKM	Ket.
		Nilai	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan		
						SKM
17	Kec. Wae Ri'i					Belum SKM
18	Kec. Rahong Utara					Belum SKM
19	Kec. Satar Mese Utara					Belum SKM
Jumlah PD Penyelenggara Pelayanan Publik						19
Jumlah PD Penyelenggara Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM						13
Jumlah PD yang sudah SKM dan memiliki Nilai IKM Baik						13
% PD yang memiliki Nilai IKM minimal Baik				= 13/19		68,42

Sumber : Bagian Organisasi, 2024

Langkah-langkah mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas dan Nilai IKM Kabupaten Manggarai:

1. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tata laksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik khususnya bagi penyandang disabilitas.
3. Meningkatkan komitmen pimpinan Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik seperti pelaksanaan survei IKM, sosialisasi terkait Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.
4. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat.

Tabel 3.22

Hasil Penilaian Kualitas dan Kepatuhan Pelayanan Publik
Pemerintah Kabupaten Manggarai
Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Uraian	Nilai/Kategori	Keterangan	
1	2021	Kualitas Pelayanan Publik	2,36	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	61,00	CUKUP (zona Kuning) Kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
2	2022	Kualitas Pelayanan Publik	2,81	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan	75,59	CUKUP (zona	Hasil Penilaian dari

No.	Tahun	Uraian	Nilai/Kategori		Keterangan
		Penyelenggaraan Pelayanan Publik		Kuning) kualitas Sedang	Ombudsman RI
3	2023	Kualitas Pelayanan Publik	2,90	CUKUP	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	70,99	CUKUP (zona Kuning) kualitas Sedang	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI
4	2024	Kualitas Pelayanan Publik	3,78	BAIK	Hasil Penilaian dari Kementerian PANRB
		Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	83,22	Baik (Zona Hijau) Kualitas Tinggi	Hasil Penilaian dari Ombudsman RI

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2024

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
Dengan Target Akhir Renstra 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2021-2026	%
			Target	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32	68,42	93,32	100,00	68,42
Rata-rata							68,42
Kategori							CUKUP

Sasaran "***Meningkatnya Sistem Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik***" tersebut dicapai melalui program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut:

Bagian Organisasi Setda				
No	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		33.530.000,00	33.500.000,00	99,91
Kegiatan Penataan Organisasi		33.530.000,00	33.500.000,00	99,91
1	Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.160.000,00	9.160.000,00	100,00
2	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24.370.000,00	24.340.000,00	99,88
Total Anggaran		33.530.000,00	33.500.000,00	99,91

3.4 INOVASI SEKRETARIAT DAERAH

Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan dimaksud, maka sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2024, Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai menargetkan 10 inovasi. Target 10 inovasi tersebut disesuaikan dengan jumlah bagian yang ada pada Sekreraiat Daerah Kabupaten Manggarai. Namun sampai dengan akhir tahun 2024, hanya 6 (enam) bagian yang memiliki/menetapkan inovasi dari 10 bagian lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai.

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah	Inovasi	10	6	60,00

Adapun inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.24
Data Inovasi Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun 2024

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja	Nama Inovasi	Status Inovasi
1	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi	CERDAS (Cepat, Efektif, Ramah dan Sempel	Berlanjut, Perlu Pembaharuan
		Bagia Adm. Pembangunan	Si-Molas (Sistem Informasi Lapangan yang Sinergis)	Inisiatif
		Bagian Pengadaan Barang/Jasa	KOIN BAJA (Media Center Konsultasi dan Informasi Layanan	Inisiatif

No	Perangkat Daerah	Unit Kerja	Nama Inovasi	Status Inovasi
			Pengadaan Barang dan Jasa)	
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	SI-PROKOPIIM (Sistem Informasi Protokol Pimpinan)	Inisiatif
		Bagian Pemerintahan	SILAPAT LKPj (Sistem Lapor Cepat LKPj)	Inisiatif
		Bagian Hukum	E-Pande Aturan (Sistem Informasi Penyusunan Regulasi Daerah)	Inisiatif

Sumber : Bapperida Kab. Manggarai, 2024

Sesuai tabel tersebut di atas, Bagian yang belum memiliki inovasi tahun 2024 adalah Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum dan Bagian Kerja Sama. Keempat Bagian tersebut pada tahun 2025 wajib menetapkan inovasi sesuai surat Bupati Manggarai Nomor : T/11/500.10.30.2/II/2025 Hal Inovasi Perangkat Daerah.

3.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Kinerja dicapai atas dasar penggunaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Di dalam penggunaan sumber daya tersebut, terutama anggaran, prinsip efisiensi wajib diterapkan sebagai bagian penyelenggaraan *good and clean governance*. Asumsi yang diterapkan adalah capaian kinerja yang tinggi dengan penggunaan anggaran yang minimal, maka efisiensi telah terjadi.

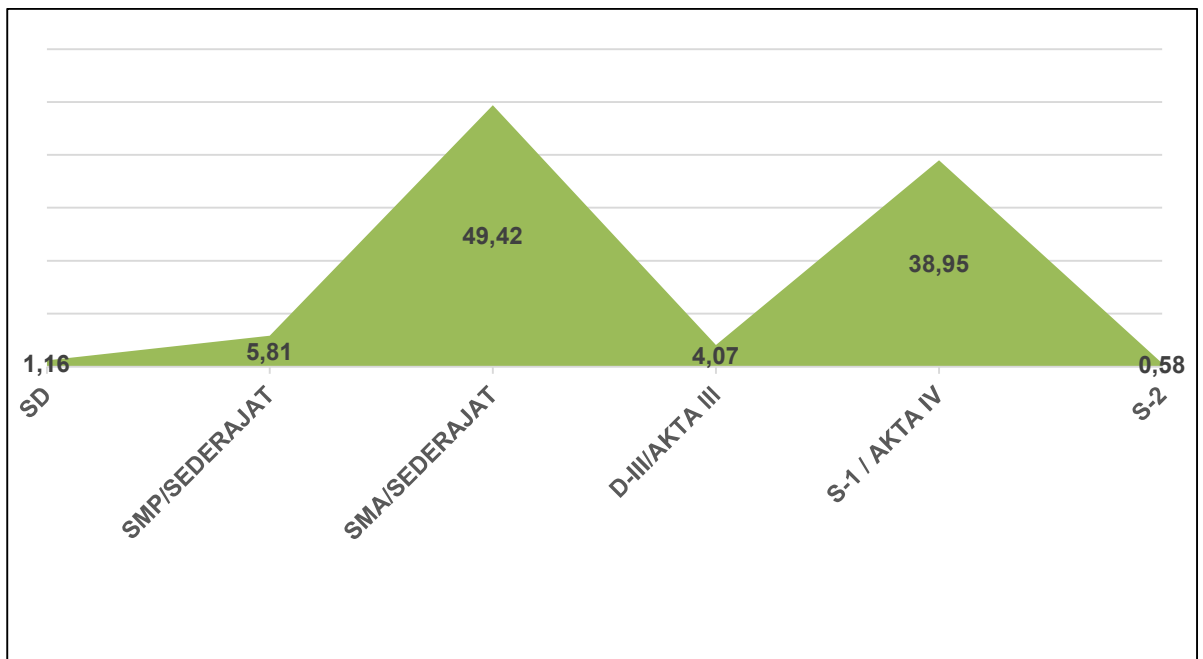
3.5.1 Sumber Daya Manusia Aparatur

ASN Lingkup Setda Kabupaten Manggarai sampai 31 Desember 2024 berjumlah 172 orang, yang terdiri dari PNS berjumlah 83 orang (48,26%) dan PPPK dan Tenaga Honorer 89 orang (51,74%). Adapun komposisi ASN Lingkup Setda Kabupaten Manggarai menurut tingkat pendidikan dan golongan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pegawai ASN menurut Pendidikan sebagai berikut :

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	PPPK dan Honorer	Jumlah	%
1.	SD	0	2	2	1,16
2.	SMP /Sederajat	4	6	10	5,81
3.	SMA/Sederajat	34	51	85	49,42
4.	Diploma III/Akta III	6	1	7	4,07
5.	S-1/Akta IV	40	27	67	38,95
6.	S-2	1	0	1	0,58
7.	S-3	0	0	0	0,00
JUMLAH		85	87	172	100,00

Grafik 3.1
Kondisi Pegawai ASN Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2024



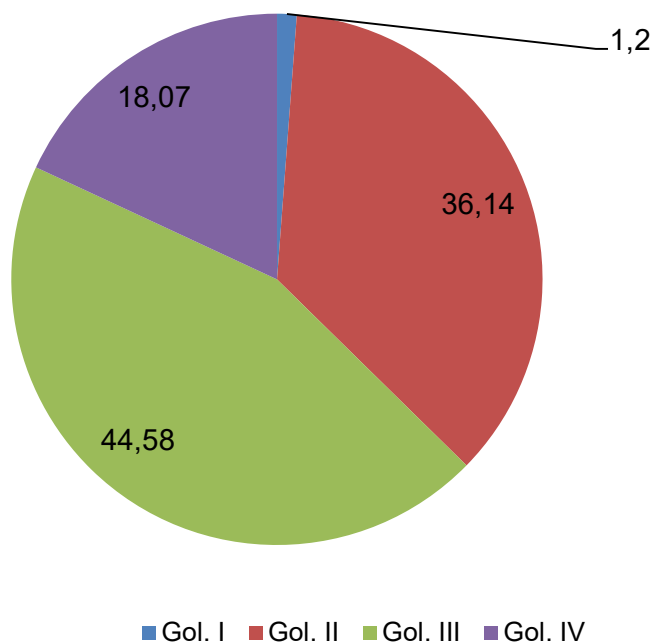
Berdasarkan tabel dan grafik tersebut di atas, komposisi Pegawai ASN Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2024, didominasi oleh tingkat pendidikan SMA/Sederajat yang mencapai 49,42% disusul tingkat pendidikan S-1/Akta IV yang mencapai 38,95%.

b. Jumlah PNS menurut Golongan sebagai berikut:

GOLONGAN		RUANG					
		A	B	C	D	JUMLAH	%
1	I	0	0	0	1	1	1,20
2	II	4	6	11	9	30	36,14

3	III	10	5	8	14	37	44,58
4	IV	3	7	4	1	15	18,07
JUMLAH						83	100,00

Diagram 3.1
Komposisi Pegawai (PNS) menurut Golongan
Tahun 2024



Komposisi Pegawai (PNS) Lingkup Setda Kabupaten Manggarai tahun 2024 menurut golongan, didominasi oleh PNS Golongan III sebesar 44,58%, disusul golongan II sebesar 36,14%.

3.5.2 Akuntabilitas Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024

Pada tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai mendapat alokasi anggaran perubahan sebesar Rp.21.545.020.337,00, realisasi Rp.19.813.311.218,00 atau 91,96% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.25
Realisasi APBD
Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai
Tahun Anggaran 2024

NO	BAGIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	Bagian Pemerintahan	378.280.000,00	359.902.580,00	95,14
2	Bagian Hukum	493.654.644,00	457.342.010,00	92,64
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.662.327.322,00	1.846.541.622,00	69,36

NO	BAGIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4	Bagian Kerja Sama	109.600.000,00	108.385.346,00	98,89
5	Bagian Adm. Pembangunan	176.127.322,00	170.504.000,00	96,81
6	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	831.200.000,00	809.997.900,00	97,45
7	Bagian Perekonomian dan SDA	178.827.322,00	174.002.010,00	97,30
8	Bagian Organisasi	238.282.000,00	233.022.556,00	97,79
9	Bagian Umum	16.163.512.439,00	15.360.299.655,00	95,03
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	313.209.288,00	293.313.539,00	93,65
Jumlah		21.545.020.337,00	19.813.311.218,00	91,96

3.5.3 Realisasi Anggaran Terhadap Sasaran Strategis

Dalam mengukur penilaian kinerja capaian keuangan dilakukan pengukuran kinerja keuangan terhadap Belanja Langsung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari pengukuran kinerja keuangan per sasaran yang dihitung dengan membandingkan pagu anggaran dan realisasi, dapat dianalisis tingkat efisiensi anggaran dari masing-masing capaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.26
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis
Tahun 2024

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.223.689.525,00	2.134.121.919,00	95,97
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.731.000,00	11.731.000,00	100,00
	Kegiatan: Penataan Organisasi	103.181.000,00	102.231.000,00	99,08
	Kegiatan: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	195.981.972,00	185.696.993,00	94,75
	Kegiatan: Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	750.360.553,00	702.056.469,00	93,56
	Kegiatan: Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.162.435.000,00	1.132.406.457,00	97,42
Total Anggaran Sasaran 1		2.223.689.525,00	2.134.121.919,00	95,97

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Program: Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.077.694.910,00	2.237.614.564,00	72,70
	Program: Perekonomian dan Pembangunan	339.997.324,00	336.311.000,00	98,92
Total Anggaran Sasaran 2		3.417.692.234,00	2.573.925.564,00	75,31
Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.530.000,00	33.500.000,00	99,91
	Kegiatan: Penataan Organisasi	33.530.000,00	33.500.000,00	99,91
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	9.160.000,00	9.160.000,00	100,00
	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	24.370.000,00	24.340.000,00	99,88
Total Anggaran Sasaran 3		33.530.000,00	33.500.000,00	99,91
Jumlah		5.674.911.759,00	4.741.547.483,00	83,55

Ket. Anggaran yang disajikan dalam tabel di atas merupakan anggaran pada program/kegiatan/sub kegiatan strategis yang terkait langsung dengan pencapaian kinerja sasaran pada Setda Tahun 2024.

3.5.4 Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja Sasaran

Analisis efektivitas dan efisiensi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Setda Kabupaten Manggarai Tahun 2024 dilakukan untuk melihat sejauh mana sumber daya (anggaran) yang digunakan cukup efisien untuk mencapai target kinerja yang sudah ditetapkan dalam mencapai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai, khususnya pada tahun 2024.

Adapun analisis efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

- a. Efektif apabila target kinerja sasarnya tercapai.
- b. Efisien apabila terdapat sisa anggaran yang tidak terserap dalam pencapaian kinerja yang efektif atau perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja dengan persentase penyerapan anggaran. Ketika rata-rata capaian kinerja lebih tinggi dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **efisien** dan sebaliknya ketika rata-rata capaian kinerja lebih

rendah dari persentase penyerapan anggaran maka dikategorikan **tidak efisien**.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.27
Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dalam Pencapaian Kinerja Sasaran
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Capaian (%)	Efektif / Tidak Efektif	Penyerapan Anggaran (%)	Efisien / Tidak Efisien
1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	100,54	Efektif	95,97	Efisien
2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	99,58	Tidak Efektif	75,31	Efisien
3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	93,32	Tidak Efektif	99,91	Tidak Efisien
Rata-rata		97,81	Tidak Efektif	83,55	Efisien

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel 3.13 tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program/kegiatan/sub kegiatan strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran **97,81%** ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran pada program-program/kegiatan-kegiatan strategis sebesar **97,81%**, menunjukkan penggunaan anggaran di lingkungan Setda Kabupaten Manggarai yang **tidak efektif** namun **efisien**.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja ini merupakan sebuah pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2024. Capaian kinerja tersebut dikelompokkan ke beberapa kategori tertentu. Kategori capaian menunjukkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan merupakan strategi atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik mempunyai beberapa prinsip dan salah satunya adalah **akuntabilitas**. Prinsip ini membuka ruang adanya control masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Kontrol tersebut harus direspons dengan baik oleh pemerintah. LKIP ini dibuat untuk merespons kontrol masyarakat dimaksud.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka disimpulkan bahwa Sekretariat Daerah telah memperlihatkan capaian kinerja yang **BAIK** atas sasaran-sasaran strategisnya. Uraian terinci atas ketiga sasaran dimaksud dapat dilihat pada table 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Tingkat Capaian Kinerja Sasaran
Tahun 2024

No.	Sasaran	Tahun 2024	
		Nilai Capaian Kinerja (%)	Kategori / Interpretasi
1.	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	100,54	ISTIMEWA
2.	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	99,58	BAIK
3.	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	93,32	BAIK
RATA-RATA		97,81	BAIK

Tabel 4.1 di atas menegaskan bahwa pada tahun 2024:

- Kinerja **ISTIMEWA** mencakup 1 (Satu) sasaran atau 33,33% yaitu:
 - Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja.
- Kinerja **BAIK** mencakup 2 (Dua) sasaran atau 66,67% yaitu:
 - Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah.

b. Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik

Terhadap capaian indikator yang belum mencapai target, dan untuk mempertahankan dan menjaga konsistensi serta meningkatkan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengalokasian anggaran di setiap Bagian Lingkup Setda Kabupaten Manggarai agar memperhatikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung IKU Sekretariat Daerah.
2. Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar dilakukan sesuai dengan Instruksi Bupati Manggarai tentang Akselerasi Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Penyelesaian Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai yang dikeluarkan setiap tahun.
3. Menginstruksikan kepada Pimpian Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mempercepat program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang.
4. Memaksimalkan fungsi Bagian Organisasi Setda dalam melaksanakan pengawasan dan pendampingan terkait implementasi pelayanan publik dan tata laksana, kelembagaan dan anjab, kinerja dan reformasi birokrasi.

Jika laporan ini belum bisa memenuhi harapan, dengan rendah hati disampaikan permohonan maaf. Kritik yang berbobot dan konstruktif untuk bekerja LEBIH BAIK di hari esok sangat diharapkan. Bekerja lebih baik tidak sekadar untuk mendapatkan sebuah LKIP dengan predikat ISTIMEWA, Baik, Cukup ataupun Kurang, tetapi terutama untuk mewujudkan **MANGGARAI MAJU, ADIL DAN BERDAYA SAING**.

Ruteng, 3 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH,



IAHANG FANSI ALDUS

Paraf Hierarki	
Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda	
Kepala Bagian Organisasi Setda	
Analisis Kebijakan Ahli Muda	

**RENCANA KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	66,00 (B)
1.1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00
1.2	-	Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi
	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00
Tujuan 2	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50
2.1	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32

Ruteng, 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,


DRS. JAHANG FANSI ALDUS
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650726 199011 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DRS. JAHANG FANSI ALDUS**
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

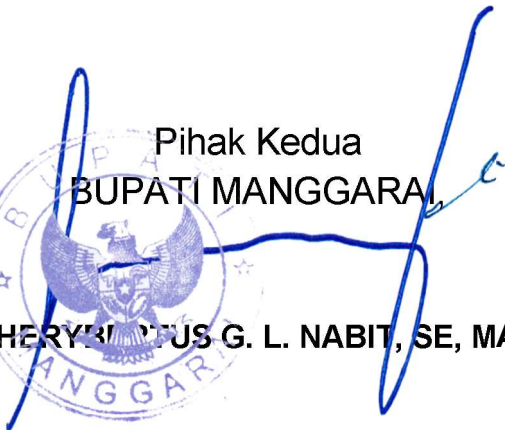
Nama : **HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA**
Jabatan : Bupati Manggarai
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 20 September 2024

Pihak Kedua
BUPATI MANGGARAI

HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Pihak Pertama
SEKRETARIS DAERAH


DRS. JAHANG FANSI ALDUS
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650726 199011 1 001

Lampiran **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024**
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
Tujuan 1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	66,00 (B)
1.1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolanan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00
		Peringkat EKPPD	Peringkat	Sangat Tinggi
1.2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00
2.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50
2.1	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32

No	Uraian	Satuan	Target
1	Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah	Inovasi	10

NO	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.223.689.525,00	APBD-P
	Kegiatan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.731.000,00	APBD-P
	Kegiatan Penataan Organisasi	103.181.000,00	APBD-P
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	195.981.972,00	APBD-P
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	750.360.553,00	APBD-P
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.162.435.000,00	APBD-P
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.077.694.910,00	APBD-P
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	339.997.324,00	APBD-P
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Pendukung)	15.903.638.578,00	APBD-P
TOTAL ANGGARAN PERUBAHAN SETDA		21.545.020.337,00	APBD-P


 BUDIATI MANGGARAI,
 HERYBERTUS G. L. NABIT, SE, MA

Ruteng, 20 September 2024
 SEKRETARIS DAERAH,

 DRS. JAHANG FANSI ALDUS
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650726 199011 1 001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
Tj.1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP Kabupaten	Angka	66,00 (B)	64,81 (B)	98,20
1	Meningkatnya pengendalian penerapan sistem akuntabilitas kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B	Persen	68,29	69,77	102,16
		Persentase Perangkat Daerah yang Indeks Kelembagaannya Efektif (Skor 61-80)	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pelayanan terhadap KDH, Wakil KDH dan Sekretaris Daerah yang sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
	Rata-rata Sasaran 1					100,54
	Kategori					ISTIMEWA
		Peringkat EKPPD	Peringkat	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00
2	Meningkatnya sistem pengendalian kebijakan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Nilai	3.5751 (Tinggi)	2,9317 (Sedang)	82,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase penyaluran bansos tepat sasaran	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase produk hukum yang tidak dibatalkan	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kebijakan bidang pembangunan yang ditindaklanjuti	Persen	100,00	100,00	100,00
		Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	Persen	80,00	97,71	122,13
		Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	60,00	53,82	89,71
		Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	45,00	45,02	100,05
		Persentase penyelesaian persoalan pengelolaan SDA sesuai ketentuan	Persen	99,00	100,00	101,01
	Rata-rata Sasaran 2					99,58
	Kategori					BAIK
Tj.2	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	82,50	86,21	104,50
3	Meningkatnya sistem pengendalian kualitas pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai IKM minimal kategori baik	Persen	73,32	68,42	93,32
	Rata-rata Sasaran 3					93,32
	Kategori					BAIK
	Rata-rata Sasaran 1 + 2 + 3					97,81
	Kategori					BAIK

NO	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Jumlah Inovasi Sekretariat Daerah	Inovasi	10	6	60,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET	REALISASI	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.223.689.525,00	APBD-P	2.134.121.919,00	95,97
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.731.000,00	APBD-P	11.731.000,00	100,00
	Kegiatan Penataan Organisasi	103.181.000,00	APBD-P	102.231.000,00	99,08
	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	195.981.972,00	APBD-P	185.696.993,00	94,75
	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	750.360.553,00	APBD-P	702.056.469,00	93,56
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.162.435.000,00	APBD-P	1.132.406.457,00	97,42
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	3.077.694.910,00	APBD-P	2.237.614.564,00	72,70
3	Program Perekonomian dan Pembangunan	339.997.324,00	APBD-P	336.311.000,00	98,92
	Total Anggaran pada Program / Kegiatan Strategis	5.641.381.759,00		4.708.047.483,00	83,46
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Kegiatan Pendukung)	15.903.638.578,00	APBD-P	15.105.263.735,00	94,98
TOTAL ANGGARAN SETDA		21.545.020.337,00	APBD-P	19.813.311.218,00	91,96

RUTENG, 3 FEBRUARI 2025

SEKRETARIS DAERAH,


 DRS. JAHANG FANSI ALDUS
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19650726 199011 1 001

